

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENGENDALIAN
KUANTITAS PENDUDUK
DI KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2018**

Oleh: Ari Utama Putra

Pembimbing: Wasni, S.IP, M.Si

Email: ariutamaputra27@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

The background of the writing of this thesis is based on the researcher's view of the phenomenon that occurs in population control, including mandatory governmental affairs that are not related to basic service and enter into concurrent government affairs in controlling the population quantity in pelalawan regency in 2018.

Researchers used a qualitative approach. This type of research is descriptive. Research location in the office of women's empowerment, child protection, population control and family planning (DP3AP2KB) Pelalawan regency. With the type and source of research data is divided into primary data in the form of purposive informant retrieval techniques and secondary data in the form of supporting data related to population growth. Data collection technique used interviews and documentation, while data analysis was carried out using quantitative analysis.

Based on the result of research and discussion, it is known that in controlling the population quantity in pelalawan regency in 2018. It has been going well, this is indicated by the emergence of several strategies in controlling population quantity in pelalawan regency in 2018, namely by implementing several population programs. For example the kampung KB program as the main program. Meanwhile, the obstacle to pelalawan regency is the division district so that it attracts the attention of the outside community to stay in pelalawan regency because whatever is categorized as the result of expansion, there will be rapid development and growth. The emergence of company is one of the perfect of the expansion area which is also on attraction for coming to pelalawan regency because a new company in an area will require a large number of workers.

Keywords : *Authority Implementation, Women Empowerment Service, Child Protection Population Control And Family Planning, Population Quantity Control*

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk dipahami sebagai perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah sebuah upaya untuk menekankan kelahiran manusia guna menciptakan masyarakat yang selaras dengan daya tampung alam. Menurut Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Disamping itu disebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembanguana keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Indonesia berada pada posisi ke empat jumlah penduduk terbanyak didunia, dengan jumlah penduduknya sebanyak hampir 267 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan pelayanan publik. Pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan agar dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan peranan Badan atau

instansi yang kompeten dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk.

Didalam proses pengendalian pertumbuhan penduduk harus dilakukan dengan beberapa tahap-tahap yang sudah disusun sedemikian baiknya agar pada saat melaksanakan proses tersebut dapat berjalan dengan baik, karena setiap saat pertumbuhan penduduk dapat berubah-ubah, maka dari itu pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya atau perbandingan populasi yang dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam suatu populasi.

Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah ialah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang dapat merubah pola pikir masyarakat tentang perlunya pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk, dan untuk menunjang keberhasilan proses ini peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan, karena apabila masyarakat hanya menjadi pendengar saja tanpa ada respon yang dilakukan, semuanya hanya akan menjadi suatu yang tidak berarti dan boleh dikatakan tidak ada manfaat yang dapat mereka peroleh. Keberhasilan program pemerintah utamanya program Badan Keluarga Berencana dalam mengendalikan jumlah penduduk sangat bergantung dari ikut sertanya dan kesadaran seluruh masyarakat di daerah Kabupaten. Salah satu jalan yang dapat ditempuh yaitu sosialisasi langsung atau denagn kata lain terjun langsung dan bertemu langsung dengan objek yang akan diberikan pengarahan yaitu masyarakat sendiri untuk melakukan perkenalan. Terhadap program yang akan diterapkan. Sosialisasi ini di anggap sangat efektif untuk diterapkan

bukan hanya Badan Keluarga Berencana yang melakukan hal ini tetapi hampir semua instansi melakukannya untuk mengenalkan program mereka masing-masing. Dalam hal pengendalian penduduk, sosialisasi sangat dibutuhkan dan Badan Keluarga Berencana meresponnya dengan membentuk tim penyuluh yang langsung terjun kemasyarakat untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Di samping tenaga penyuluh yang masih kurang serta letak topografi Kabupaten.

Pernyataan Thomas Malthus yang menyatakan bahwa penduduk cenderung tumbuh secara "deret ukur" (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung bertumbuh secara "deret hitung" (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya) sudah terbukti kebenarannya, yaitu penduduk semakin banyak sedangkan lahan yang ada tidak mengalami penambahan. Dengan bertambahnya penduduk pasti akan membutuhkan tambahan berbagai fasilitas seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, pasar/pusat perbelanjaan dan lain – lain dengan pemenuhan berbagai fasilitas tersebut akan berdampak pada lahan untuk bercocok tanam menjadi semakin berkurang sehingga penyediaan makanan/hasil pertanian turut berkurang pula.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memberikan dampak positif yaitu sebagai unsur penting dalam

menegembangkan kegiatan produksi dan ekonomi. Selain memberikan dampak yang positif, pertumbuhan penduduk juga memberikan dampak yang negatif dalam berbagai aspek yang nantinya akan memiliki pengaruh satu sama lain.

Dampak positif dari pertumbuhan penduduk sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Sumber Daya Alam
2. Meningkatnya Produksi
3. Kesempatan untuk berwirausaha menjadi lebih besar
4. Meningkatnya solidaritas antar bangsa
5. Meningkatna inovasi kerja, karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk sebagai berikut ;

1. Meningkatnya angka pengangguran
2. Meningkatnya angka criminal
3. Meningkatnya angka kemiskinan
4. Kesehatan masyarakat akan menurun
5. Banya limbah serta polusi
6. Berkembangnya pemukiman tidak layak huni

Disamping itu dari data yang saya dapatkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan					km ²		
		2016	2017	2018	Laju Pertumbuhan Penduduk*	%	2016	2017	2018
1	Langgam	115.764	124.974	134.672	0,0785788	8%	598	646	620
2	Pangkalan Kerinci	33.599	37.233	41.184	0,1071362	11%	105	117	127
3	Bandar Sei Kijang	58.856	61.055	63.221	0,0364188	4%	50	52	52
4	Pangkalan Kuras	39.264	40.258	41.204	0,0244067	2%	30	31	31

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan					km ²		
		2016	2017	2018	Laju Pertumbuhan Penduduk*	%	2016	2017	2018
5	Ukui	31.624	32.582	33.509	0,0293719	3%	63	65	76
6	Pangkalan Lesung	15.355	15.929	16.492	0,0363626	4%	38	39	37
7	Bunut	19.530	20.165	20.784	0,0316050	3%	13	13	14
8	Pelalawan	14.195	14.368	14.517	0,0112784	1%	38	39	40
9	Bandar Petalangan	18.055	18.126	18.198	0,0039523	0%	12	12	27
10	Kuala Kampar	23.699	24.546	25.423	0,0357343	4%	25	26	26
11	Kerumutan	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Teluk Meranti	17.047	17.581	18.132	0,0313329	3%	4	4	4
Total		417.498	438.788	460.780	0,0505511	5%	30	32	35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan (Kabupaten Pelalawan Dalam Angka) Note * data olahan pribadi dengan rumus geometrix

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Berdasarkan dari tabel diatas pada tahun 2018 mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk yang menurut penulis cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan 2016. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 tercatat 460.780 jiwa yang laju pertumbuhan

penduduknya 0,0505511 yang dipersenkan menjadi 5%. Pertumbuhan penduduk termasuk cepat apabila pertumbuhan penduduk melebihi 2% dari jumlah penduduk tiap tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pelalawan mencapai 5%

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

Kecamatan	Daratan	Sungai	Total	% Wilayah
Langgam	142.396,15	1.848,94	144.245,09	10,36
Pngkalan Kerinci	18.176,16	639,37	19.355,53	1,39
Bandar Sei Kijang	31.856,87	84,33	31.941,20	2,29
Pangkalan Kuras	117.746,75	642,04	118.388,79	8,50
Ukui	129.268,77	687,29	129.965,06	9,33
Pangkalan Lesung	50.159,83	325,29	50.485,12	3,63
Bunut	40.620,09	182,68	40.802,77	2,93
Pelalawan	147.060,05	2.751,26	149.811,31	10,76
Bndar Petalangan	36.996,29	258,87	37.255,16	2,68
Kuala Kampar	80.905,73	69.359,46	150.265,19	10,79
Kerumutan	95.314,31	689,35	96.003,66	6,89
Teluk Meranti	391.140,47	32.843,94	423.984,41	30,45
Total	1.282.181,47	110.312,82	1.392.494,29	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan (Kabupaten Pelalawan Dalam Angka)

Dari tabel diatas dapat dilihat luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci yang luas wilayahnya hanya 19.355,53Ha atau bisa dikatakan luas wilayah, Pangkalan Kerinci adalah yang paling kecil di Kabupaten Pelalawan

tetapi jumlah penduduknya bisa dikatakan yang paling banyak, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Bandar Petalangan yang luas wilayahnya adalah 37.255,16Ha.

Tabel 1.3
Jumlah Persalinan Bayi, Bayi Lahir Hidup, dan Bayi Lahir Mati Menurut Kecamatan 2018

Kecamatan	Persalinan	Bayi Lahir Hidup	Bayi Lahir Mati
Langgam	801	795	6
Pangkalan Krinci	3.533	3.524	9
Bandar Sei Kijang	615	615	4
Pangkalan Kuras	1.210	1.209	1
Ukui	1.022	1.022	-
Pangkalan Lesung	713	713	-
Bunut	321	317	4
Pelalawan	507	206	1
Bandar Petalangan	267	263	4
Kuala Kampar	327	325	2
Kerumutan	670	670	-
Teluk Meranti	417	415	2
Pelalawan	2018	10.403	10.374
	2017	8.099	8.085
	2016	7.890	7.839

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan (Kabupaten Pelalawan Dalam Angka)

Adanya peningkatan jumlah penduduk dan tingginya angka kelahiran memacu keinginan pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tepatnya pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melakukan tindakan yang dapat mengontrol laju pertumbuhan penduduknya dan mengontrol angka kelahiran.

Pentingnya masalah pengendalian penduduk tersirat dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pasal 12 ayat 2 huruf h yaitu Pengendalian penduduk dan keluarga berencana termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan masuk kedalam urusan pemerintah konkuren sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 3 yaitu Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan fenomena – fenomena dalam latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka pertanyaan

yang muncul dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian kuantitas penduduk dikabupaten Pelalawan tahun 2018?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan dalam pengendalian kuantitas penduduk dikabupaten Pelalawan tahun 2018 ?

Kerangka Teoritis

Pelaksanaan

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula Pelaksanaan adalah pelaksanaan

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang

diharapkan instansi pelaksana.

- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan pelaksanaan setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Kewenangan Pemerintah

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan (authority, gezag) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.

Menurut Prajudi kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Indroharto menyatakan secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Kewenangan pemerintah berkaitan dengan asas legalitas, asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasari pada perundang-undangan. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Demikian substansi dari asal legalitas adalah wewenang.

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti dilapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi teori yang timbul dilapangan. Proses penelitian kualitatif menggunakan suatu periode dan dilakukan berulang-ulang untuk mengungkapkan secara cermat dan lengkap keadaan yang sesungguhnya

Tabel 1.6
Informan Penelitian

No	Jabatan	Nama	Jumlah
1	Kepala Dinas DP3AP2KB	Ferry Zulkarnain Fasda Bino SE. M.Si	1
2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ernawati	1
3	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ferimen Wandri, SKM	1
4	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi dan Data	Budi Setiawan, SKM, MKM	1
5	Sub Bagian Program	Indria Nesfvi, S.Psi	1

Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2020

**Hasil Penelitian & Pembahasan
Pelaksanaan Kewenangan
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Dalam Pengendalian Kuantitas
Penduduk Dikabupaten
Pelalawan Tahun 2018**

Penelitian ini penulis mengamati pelaksanaan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian kuantitas penduduk dikabupaten Pelalawan tahun 2018, dimana penulis memberi fokus peran dinas terhadap Pengendalian pertumbuhan penduduk, untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

**1. Penyiapan Sumber
Daya, Unit Dan Metode
Pemerintah**

memiliki tugas yang sangat berat dalam mengatasi pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah membentuk suatu badan yang ditugaskan untuk mengatasi hal

tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2010, dalam melaksanakan arah kebijakan Nasional di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga, pemerintah telah menetapkan strategi di mana untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hal pertumbuhan penduduk dalam Rekarnas Tahun 2011-2015 telah menetapkan kebijakannya yaitu : menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan KB, menggerakkan dan memberdayakan para pemangku kepentingan (stakeholders), mitra kerja serta masyarakat, menata kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, pegawai dan tenaga penyuluh, serta meningkatkan pembiayaan.

Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Nasional di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga telah ditetapkan strategi utama di mana untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hal

pertumbuhan penduduk telah mengeluarkan kebijakannya yaitu, meliputi;

- a. Menyeraskan kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan KB
- b. Menggerakkan dan memberdayakan para pemangku kepentingan (stakeholders), mitra kerja serta masyarakat
- c. Menata kelembagaan
- d. Memperkuat sumber daya manusia, pegawai dan tenaga penyuluh
- e. Meningkatkan pembiayaan.

Melihat kebijakan di atas di tiap-tiap daerah juga memiliki kebijakan sendiri tetapi harus berdasarkan kebijakan dari pusat, salah satunya daerah Kabupaten Pelalawan.

2. Penerjemahan Kebijakan Menjadi Rencana Dan Arahan Yang Dapat Diterima Dan Dijalankan

Pemerintah telah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan

bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Masalah kependudukan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari negara kita, karena negara kita termasuk salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Laju pertumbuhan di suatu negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian, kesehatan, sosial budaya, tingkat pendidikan, kesejahteraan maupun pembangunan. Dalam latar belakang sudah kita lihat bahwa pertumbuhan penduduk memegang peranan penting baik dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan. Lajunya

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pelalawan membuat Dinas DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan mencari cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan memiliki harapan pada program kampung KB untuk memberi perubahan pada laju penduduk Kabupaten Pelalawan yaitu dengan penggunaan alat kontrasepsi berbentuk jangka panjang. Namun selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pelalawan program kampung KB juga mencakup ibu hamil hingga lanjut usia. Adapun peserta KB aktif dan alat kontrasepsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Pelalawan Periode Tahun 2016-2018

Tahun	Alat Kontrasepsi							Peserta KB aktif
	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL	
2016	6190	390	4	464	1416	14383	9770	32627
2017	2997	521	149	1136	5765	13500	7681	31749
2018	2316	802	90	1600	4819	11776	19857	41260

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan hal ini perlu di tingkatkan untuk mensosialisasikan pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk agar lebih baik lagi.

3. **Penyediaan Layanan, Pembayaran Dan Hal Lain Secara Rutin**

KB menjadi kebutuhan dimasyarakat. Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda, dan menghentikan) maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang sudah mengadakan kegiatan KB gratis untuk masyarakat Ukui. Kegiatan ini dapat membantu masyarakat

mendapatkan pelayanan pemasangan alat akseptor secara gratis, karena banyak masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan program keluarga berencana namun terbentur dengan masalah dana.

Kegiatan ini merupakan program nasional yang sengaja dilaksanakan di berbagai desa, supaya program keluarga berencana bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.dengan digalakkannya program KB ini, bukan berarti pemerintah membatasi masyarakat memiliki banyak anak, namun disarankan sebaiknya dua orang anak cukup sehingga masa depan anak baik sekolah dan pekerjaannya terjamin. Ada 6 macam jenis alat KB yaitu : pil KB, suntik KB, Implan, IUD, pasektomi dan tubektomi, namun pada kegiatan pelayanan KB yang di berikan kepada masyarakat Kecamatan Ukui pada kegiatan KB gratis kali ini adalah berupa pemasangan alat akseptor KB seperti pemasangan implan dan IUD, suntik KB dan pemberian pil KB secara cuma-cuma.

Faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan dalam pengendalian kuantitas penduduk dikabupaten Pelalawan tahun 2018

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Dikabupaten Pelalawan Tahun 2018 terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya adalah:

1. Pemekaran daerah yang menjadi daya tarik masyarakat luar Kabupaten Pelalawan untuk datang dan menetap di Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dimekarkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejak terjadinya pemekaran di kabupaten Pelalawan. Hal ini terlihat dari peningkatan penduduk di dua tahun setelah pemekaran. Pada tahun 1999 sebelum pemekaran penduduk kabupaten Pelalawan sebanyak 142.833 jiwa yang kemudian meningkat menjadi 152.949 jiwa di tahun 2000 kemudian kembali meningkat kembali menjadi 168.737 jiwa di tahun 2001. Hal ini terjadi karena selain dari kelahiran penduduk juga terkait dengan penduduk yang datang dan menetap di kabupaten Pelalawan khususnya setelah pemekaran kabupaten Pemekaran.

2. Berdirinya perusahaan yang tidak terkendali di Kabupaten Pelalawan menjadi daya tarik masyarakat luar Kabupaten Pelalawan untuk datang dan

menetap di Kabupaten Pelalawan

banyak perusahaan dengan berbagai jenis serta baik yang punya izin maupun tidak telah bermunculan di Kabupaten Pelalawan. Indikasi kedepannya adalah akan terus bermunculan perusahaan baru dengan jenis usaha yang berbeda-beda sehingga dalam hal ini akan menjadi pendorong bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan dari segi migrasi penduduk luar untuk masuk dan menetap baik secara resmi maupun tidak resmi di Kabupaten Pelalawan. Sehingga dalam hal ini perlu peran pemerintah dalam memberi izin pendirian perusahaan di Kabupaten Pelalawan dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hari Sabarno, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi. Aksara,
- Mazmanian and Sabatier, 2014, *Implementation and Public Policy Glenview, III*: Scott, Foresman.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.

Muslimin. 2002. *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*. Jakarta: Bayu Media Dan UMM Press

Prajudi, Atmosudirjo, S. 2006. *Administrasi Dan Manajemen Umum. Jilid II*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Purwanto dan Sulistyastuti, 1991. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Ridwan, H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara: edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers,

Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi. Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta :Laksbang Mediatama.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Yohannes Yahya. 2006. *Hukum Administrasi Negara: edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan

Jurnal/Artikel

Abdurrahman. 2019. Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik-FISIP UM Mataram, Vol. 7 No. 2 September 2019*

Ahmad Irwandi. 2019. Peran Pemerintah Desa Dalam Pendapatan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan

Koto Kampar Hulu Kabupaten
Kampar Tahun 2014-2016.

M. Hade Ramadhan. 2020. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Volume 1, Issue 1, June 2020 (47-57)*

Merita Rahma. 2019. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pelaksanaan Program KB Dinamis/Tim KB Keliling (Analisis Terhadap Implementasi Program KB Dinamis/TKBK DiKabupaten Pring Sewu).

Muhammad Fitra Admaja. 2019. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda. *Volume 7, Nomor 2, 2019: 983-994*

Stefhen Tatuhe. 2016. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal [Vol 1, No.37](#)*

Dokumen lainnya

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Pelalawan Dalam Angka

Dokumen Pendukung dari Pihak
DP3AP2KB

Kampungkb.bkkbn.go.id